



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



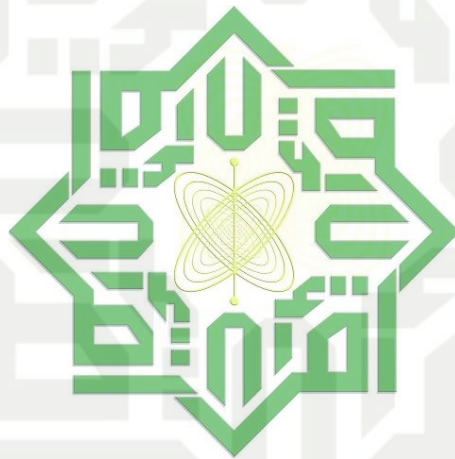
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKIBAT HUKUM JUAL BELI MOTOR BEKAS YANG TIDAK
MENGUNAKAN KUITANSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN
BEA BALIK NAMA DI KECAMATAN RUMBIO JAYA**

KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI



OLEH

**MASRI YANDI
NIM.11327105103**

**ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *AKIBAT HUKUM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS YANG TIDAK MENGGUNAKAN KUITANSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN BEA BALIK NAMA DI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN CAMPAR*, yang ditulis oleh:

Nama : Masri Yandi
NIM : 11327105103
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Maret 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Feri Pirmansyah, SH., M.H.

Penguji I
Boni Kurniawan, SH., MH.

Penguji II
Safrinaldi, SH., MA.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Jual beli haruslah dilakukan dengan sempurna dan dengan iktikad baik, baik dari penjual maupun dari pembeli. Demikian juga halnya dengan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Kabupaten Kampar, yang seharusnya menggunakan kuitansi tetapi tidak menggunakan kuitansi pembelian. Kuitansi pembelian tersebut penting sebagai bukti sudah terjadi jual beli, dan sebagai alat untuk balik nama, dan supaya harganya tidak turun ketika mau menjual lagi. Di samping itu juga agar tidak dituduh membeli barang curian, tidak bayar pajak, dan dapat juga berpengaruh kepada status hukum dari kendaraan tersebut. Kuitansi pembelian suatu barang adalah penting, sebagaimana halnya pembelian sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tersebut, apabila tidak menggunakan kuitansi maka barang yang dibeli tersebut bisa saja diragukan, apakah barang tersebut benar miliknya atau bisa saja milik orang lain.

Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dan bagaimana status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, antara lain adalah pembeli tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran, ketika ada pihak-pihak yang menanyakan hal tersebut. Di samping itu pembeli tidak menunjukkan kuitansi pembelian pada saat mau balik nama kepemilikan kendaraan tersebut, dan kuitansi pembelian tersebut juga berguna untuk tanda bukti pembayaran yang sah karena menggunakan materai enam ribu.

Sedangkan status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, adalah sah menurut hukum karena dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tentang barang dan harga yang ditawarkan maka sudah terjadi jual beli. Namun karena tidak menggunakan kuitansi secara administrasi kurang lengkap, karena pembayaran sejumlah uang tersebut harus ada buktinya berupa kuitansi pembayaran yang dibuat di bawah materai enam ribu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, SH, MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2019

MASRI YANDI
NIM.11327105103

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Rumbio Jaya	13
B. Geografis Kecamatan Rumbio Jaya	17
C. Keadaan Sosial Ekonomi	19
D. Sasaran, Hambatan, dan Pemecahan Masalah yang Terjadi	19
 BAB III KONSEP TEORITIS	
A. Pengertian Perjanjian.....	22
B. Bentuk-Bentuk Perjanjian	23
C. Unsur-Unsur Perjanjian	27
D. Asas-Asas Perjanjian	27
E. Pengertian Jual Beli	30
F. Unsur dan Sifat Jual Beli	32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	35
B. Status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	9
------------------------------------	---





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai hukum tidak terlepas dari hak dan kewajiban, ketika hak dan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan aturannya maka tidak ada masalah yang terjadi, tetapi apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan aturannya, maka akan terjadi permasalahan antara kedua belah pihak.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.¹

Demikian juga halnya dengan bisnis yang dilakukan oleh seseorang bentuk dan jenisnya bermacam-macam yang juga menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun bisnis yang dilakukan ada yang dalam bentuk barang, jasa dan perdagangan. Semuanya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga halnya dengan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Dalam pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa: “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²

Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa jual beli terjadi apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harganya. Dan apabila telah terjadi kesepakatan mengenai hal tersebut, maka pada saat itu telah terjadi jual beli.

Kegiatan jual beli memang sudah menjadi sesuatu kegiatan yang setiap hari terjadi, dan semua barang yang dapat dimiliki merupakan barang yang telah dibeli dari penjual. Dalam kegiatan tersebut, diharuskan timbul kesepakatan, karena kesepakatan dalam jual beli merupakan sesuatu yang sangat penting, dengan kesepakatan itulah maka jual beli dapat terjadi.

Perjanjian jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas adalah;

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.³

²R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 366

³Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h, 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian muncul pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun selain itu ada hal lain yang mesti diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya untuk mengadakan perjanjian para pihak harus cakap. Seseorang dianggap cakap menurut hukum jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap ketika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu perjanjian objeknya harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat pula berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya rugi dan bunga” (pasal 1242 KUH Perdata).⁴

⁴Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014), h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Dari syarat-syarat perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang berjanji. Oleh sebab itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan jual beli suatu barang, juga harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan. Jual beli terhadap suatu barang yang mempunyai nilai yang besar harus ditandai dengan surat atau kuitansi sebagai bukti bahwa barang tersebut dibeli sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan tidak ada yang salah sangka atau salah duga bahwa barang yang dibeli tersebut ilegal atau bisa saja barang tersebut diperoleh secara tidak sah.

Jual beli haruslah dilakukan dengan sempurna dan dengan iktikad baik, baik dari penjual maupun dari pembeli. Demikian juga halnya dengan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Kabupaten Kampar, yang seharusnya menggunakan kuitansi tetapi tidak menggunakan kuitansi pembelian. Kuitansi pembelian tersebut penting sebagai bukti sudah terjadi jual beli, dan sebagai alat untuk balik nama, dan supaya harganya tidak turun ketika mau menjual lagi.

Di samping itu juga jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi juga dapat terjadi akibat hukum, antara lain bisa saja dituduh membeli

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

barang curian, tidak bayar pajak, sulit untuk mengubah nama dari pemilik asal dan juga berpengaruh kepada status hukum dari kendaraan tersebut.

Sebagaimana halnya yang dialami oleh Sulis yang mengatakan, bahwa sebagai akibat dari pembelian sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi, maka ketika mau mengurus bea balik nama bermasalah karena kuitansi jual beli tersebut tidak ada, sedangkan salah satu syarat dari balik nama tersebut adalah kuitansi pembelian.⁶

Bagi pembeli tentunya akan mengalami kerugian akibat hal tersebut. Oleh karena itu bukti pembelian suatu barang adalah sangat penting sebagai alat bukti dan alas hak atas sahnya suatu barang tersebut sudah dibeli secara benar, dan tidak ada masalah dikemudian hari. Berbeda halnya dengan jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Tentunya dikemudian hari akan terjadi akibat hukum dari hal tersebut yang dapat merugikan pihak pembeli.

Kuitansi pembelian suatu barang adalah penting, sebagaimana halnya pembelian sepeda motor bekas yang berhubungan dengan bea balik nama di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tersebut. apabila tidak menggunakan kuitansi maka barang yang dibeli tersebut bisa saja diragukan, apakah barang tersebut benar miliknya atau bisa saja milik orang lain. Oleh karena itu kuitansi merupakan alat bukti bahwa barang yang dibeli tersebut adalah benar miliknya dan dibuktikan melalui kuitansi pembelian.

⁶Sulis (pembeli), Wawancara, Tanggal 16 Desember 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian dan permasalahan di atas, penulis ingin melihat akibat hukum dari jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya dalam bentuk skripsi, dengan judul: “AKIBAT HUKUM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS YANG TIDAK MENGGUNAKAN KUITANSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN BEA BALIK NAMA DI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR”.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan pada akibat hukum yang timbul dari jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama, serta status hukum sepeda motor bekas yang dibeli tidak menggunakan kuitansi.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah jual beli.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai perjanjian jual beli pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan

dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁷ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak dalam jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h.52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bea balik nama di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,⁸ artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Kecamatan Rumbio Jaya. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih banyak jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama, sehingga perlu dilihat bagaimana akibat dan status hukumnya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah jual beli sepeda motor bekas.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,⁹ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak

⁸ Ibid, h.50

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berhubungan dengan jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama.

- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹⁰ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹¹

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah penjual sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama sebanyak 5 orang, dan pembeli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi sebanyak 5 orang. Oleh karena populasi jumlahnya kecil, maka penulis mengambil populasi sebagai sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

¹⁰*Ibid*, h.30

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

¹²*Ibid*, h.119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTAS E	KETERANGA N
1	Penjual sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi	5	5	100%	Total Sampling
2	Pembeli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi	5	5	100%	Totaal Sampling
	JUMLAH	10	10	100%	Total Sampling

Sumber: Data lapangan, 2018

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹³ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu penjual dan pembeli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi.

¹³Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁴Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h.252



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum tentang Kecamatan Rumbio Jaya, Geografis Kecamatan Rumbio Jaya, Demografis Kecamatan Rumbio Jaya, dan gambaran tentang Sosial dan Budaya Kecamatan Rumbio Jaya.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian jual beli, dan jenis-jenis jual beli.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya, dan status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rumbio Jaya

Kecamatan Rumbio Jaya adalah salah satu dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Kecamatan Rumbio Jaya merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kampar yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2005. Ibu kota Kecamatan Rumbio Jaya adalah Teratak yang berjarak 17 (tujuh belas) Km dari Kota Bangkinang, dengan luas wilayah 77,5 Km² dengan jumlah penduduk menurut data per Januari Tahun 2017 sebanyak 16.347 Jiwa dengan 4.312 KK.

Wilayah Kecamatan Rumbio Jaya terdiri dari 7 (tujuh) desa. Adapun nama-nama desa di Kecamatan Rumbio Jaya adalah sebagai berikut:

1. Desa Teratak
2. Desa Pulau Payung
3. Desa Alam Panjang
4. Desa Bukit Kratai
5. Desa Batang Batindih
6. Desa Tambusai
7. Desa Simpang Petai.¹⁶

Dari gambaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa, Kecamatan Rumbio Jaya merupakan daerah pemekaran yang dulunya termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kampar.

¹⁶Profil Kecamatan Rumbio Jaya, Tahun 2018



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.¹⁷

¹⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa
- b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan Kepala Desa
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat Kecamatan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati atau Walikota

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.¹⁸

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain

¹⁸ Kansil, C. ST, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.¹⁹

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

¹⁹ *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Geografis Kecamatan Rumbio Jaya

Batas wilayah Kecamatan Rumbio Jaya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tapung.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampar.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampar Timur.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampar Utara.²⁰

Wilayah Kecamatan Rumbio Jaya berada pada ketinggian sekitar 40 meter dari permukaan laut dengan topografi daerah dataran rendah. Sedangkan jenis tanah di Kecamatan Rumbio Jaya sebagian besar adalah Padzolik Merah Kuning (PMK). Sedangkan curah hujan selama tujuh tahun terakhir tidak menentu sebagaimana biasanya akibat eksploitasi hutan menjadi lahan perkebunan, polusi asap akibat pembakaran hutan dan lahan.

C. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk di Kecamatan Rumbio Jaya merupakan penduduk yang heterogen, yaitu terdiri dari masyarakat asli (tempatan) dan masyarakat pendatang. Masyarakat umumnya berada di 4 (empat) desa, yaitu Desa Alam Panjang, Desa Teratak, Desa Pulau Payung, dan Desa Simpang Petai. Sedangkan desa yang lainnya didomisili oleh masyarakat pendatang.

Sekitar/lebih kurang 65% mata pencaharian masyarakat adalah bertani, dan sisanya merupakan pedagang, buruh, pandai besi, PNS dan sebagainya. Dengan hasil pertanian yang terbesar di Kecamatan Rumbio Jaya adalah

²⁰*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hortikultura dan hanya sebagian kecil yang merupakan palawija. Desa Bukit Kratai, Desa Batang Batindih dan Desa Tambusai merupakan desa dengan penghasil hortikultura terbesar di wilayah ini.

Pendidikan masyarakat pada umumnya hanya sampai sekolah menengah dan hanya sebagian kecil yang merupakan tamatan perguruan tinggi, di bidang kebudayaan terdapat bermacam-macam kesenian tradisional, yaitu calempong, gong, berzanji, marhaban, rebana, badiqiu dan sebagainya. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah ini telah terdapat 1 (satu) unit Puskesmas yang terletak di kota Kecamatan. Dan untuk setiap dusun dibentuk Posyandu yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu hamil dan balita.

D. Sasaran, Hambatan, dan Pemecahan Masalah yang Terjadi

Sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang administrasi dan kependudukan, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan lain-lain.
2. Terlaksananya pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, dengan melaksanakan pengawasan.
3. Terlaksananya pemerintahan yang dipercaya masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
4. Menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan pembinaan dan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Rumbio Jaya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Rumbio Jaya dan Kantor Desa, seperti meubiler, kendaraan dinas roda dua dan personil.
2. Tingkat keterampilan pegawai masih rendah.
3. Terdapat batas antara kecamatan dan desa yang belum dipatok.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha.
5. Kesejahteraan pegawai yang masih kurang.
6. Kemampuan aparat desa yang masih rendah.

Kemudian pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk membenahi kekurangan dan hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten melengkapi fasilitas yang ada di Kantor Kecamatan Rumbio Jaya, Dinas dan Instansi yang ada di lingkungan Kecamatan Rumbio Jaya.
2. Mengikut sertakan pegawai, seperti tugas belajar, diklat-diklat dan sebagainya.
3. Hendaknya Pemerintah Kabupaten memprogramkan penyelesaian tapal batas kecamatan, desa dan disertai dengan panduannya.
4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai yang ada di Kecamatan.
5. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan setiap usaha mereka sesuai dengan Peraturan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meningkatkan keterampilan Aparatur Pemerintahan Desa, seperti mengadakan kursus dan penataran.²¹

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, bagi daerah yang baru dimekarkan memang masih banyak kekurangan, dan perlu dilakukan pembenahan secara bertahap agar tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai, yakni meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berurusan di Kantor Kecamatan dan Kantor Desa.

²¹*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS

A. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²²

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah.²³

B. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni pasal 1320. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;

²² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h, 25

²³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Secara ringkas masing-masing syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata ialah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.²⁴

Pengertian suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang ke empat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat diatas supaya sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*). Perjanjian semacam ini sejak

²⁴Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 18



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut.²⁵

B. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang

²⁵ *Ibid.*, h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notariel merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu Pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangat berat.²⁶

C. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Unsur *essensialia*;
- b. Unsur *naturalia*;
- c. Unsur *accidentalia*.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Adapun unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

Sementara itu, unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

²⁶Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.



D. Asas-Asas Perjanjian

Dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁷

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan kontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

²⁷ Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pustaka Mahardika),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas *Fakta Sun Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata.²⁸

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata, yang menentukan bahwa ‘‘setiap perjanjian yang dibuat secara sah

²⁸ Munir Fuady, *pengantar hukum bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya''. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

E. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik tercapainya, "sepakat" mengenai barang dan jasa.

Konsensualisme berasal dari kata "konsensus", yang berarti 'kesepakatan'. Dengan kesepakatan, dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya, apa yang dikehendaki oleh yang satu merupakan apa yang dikehendaki oleh yang lain dan kedua kehendak itu bertemu dalam 'sepakat' tersebut.²⁹

Asas konsensualisme yang dianut oleh hukum perjanjian KUH Perdata tersebut, disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan pasal 1338 ayat 1 KUH

²⁹Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi offset, 2010), h. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perdata. Pasal 1338 ayat 1 berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”.

dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk dan cara (formalitas) apa pun (misalnya, tulisan, pemberian tanda atau panjer, dan lain sebagainya), dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu maka sahlah atau mengikatlah perjanjian itu, atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁰

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa jual beli tersebut terjadi ketika kedua belah pihak sepakat, bahwa yang satu menyerahkan barangnya dan pihak yang lain membayar sejumlah uang sebagai harga dari barang yang diperjanjikan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan, bahwa “Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun

³⁰*Ibid.*, h. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual-beli terjadi ketika adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu barang, walaupun harga barang tersebut belum dibayar tetapi jual beli sudah terjadi ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

F.Unsur dan Sifat Jual Beli

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual-beli terjadi ketika adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu barang, walaupun harga barang tersebut belum dibayar tetapi jual beli sudah terjadi ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan³¹. Dari pengertian perjanjian jual beli tersebut, maka ada beberapa hal pokok dalam perjanjian jual beli :

- a. Ada dua pihak Pihak penjual yaitu pihak yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang.
- b. Pihak pembeli yaitu pihak yang berjanji untuk membayar harga suatu barang.
- c. Adanya unsur essensialia dari perjanjian jual beli yaitu barang dan harga.

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1457 KUHperdata)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan (bertimbal balik).

Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan sifat-sifat perjanjian jual beli, yaitu³²:

1. Bersifat Konsensual, artinya perjanjian jual beli telah terjadi dengan adanya kata sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan.
2. Bersifat Obligatoir, artinya perjanjian jual beli hanya menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian jual beli tidak mengakibatkan perpindahan hak milik. Hak milik atas suatu benda baru berpindah apabila sudah ada penyerahan (*levering*). Penyerahan (*Levering*) adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik.

Selanjutnya jual beli yang dilarang ada beberapa macam, yaitu:

1. Jual beli barang haram, yaitu menjual minuman yang beralkohol, atau hal-hal yang berasal dari proses yang diharamkan, yakni hasil korupsi, hasil pencurian dan sebagainya.
2. Penjualan dengan mengurangi timbangan, hal ini melanggar kesepakatan transaksi jual beli.
3. Jual beli dengan riba, yaitu sifatnya mencekik pembeli atau objeknya. Misalnya membeli barang dengan kredit, kemudian ada biaya tambahan

³² Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1458 KUHperdata)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membuat harganya jauh lebih tinggi dari saat pembelian atau dari harga normal.

Dalam Hukum Perdata dijelaskan jual beli yang dilarang, yaitu:

1. Pasal 1467 KUH Perdata menjelaskan, bahwa antara suami isteri tidak dapat terjadi jual beli.
2. Pasal 1468 KUH Perdata menjelaskan, bahwa Para Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris tidak boleh ada penyerahan barang atau benda yang dalam proses perkara di pengadilan.
3. Pasal 1469 KUH Perdata menjelaskan, atas ancaman, para pegawai yang memangku jabatan tidak boleh membeli barang-barang yang dijual untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.
4. Pasal 1470 KUH Perdata menjelaskan, tidak boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara.
5. Pasal 1471 KUH Perdata menjelaskan, bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal.
6. Pasal 1472 KUH Perdata, yaitu pada saat penjualan, barang yang dijual sudah musnah, maka pembelian adalah batal.

Beberapa hal tersebut di atas merupakan jual beli yang dilarang, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum Perdata. Apabila jual beli yang tersebut di atas dilakukan, maka sudah pasti ada konsekuensinya, yaitu pembatalan dan/atau ganti kerugian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, antara lain adalah pembeli tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran, ketika ada pihak-pihak yang menanyakan hal tersebut. Di samping itu pembeli tidak menunjukkan kuitansi pembelian pada saat mau balik nama kepemilikan kendaraan, maka akan mengalami kesulitan mengurus balik nama kendaraan tersebut karena salah satu syarantya adalah kuitansi jual beli, serta kuitansi pembelian tersebut juga berguna untuk tanda bukti pembayaran yang sah karena menggunakan materai enam ribu.
2. Status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, adalah sah menurut hukum karena dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tentang barang dan harga yang ditawarkan maka sudah terjadi jual beli. Namun karena tidak menggunakan kuitansi secara administrasi kurang lengkap, karena pembayaran sejumlah uang tersebut harus ada buktinya berupa kuitansi pembayaran yang dibuat di bawah materai enam ribu.



B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual harus mempunyai iktikad baik dalam menjual barang, yakni sepeda motor bekas dengan memberikan tanda pembayaran yang sah kepada pembeli yaitu berupa kuitansi di atas materai, sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap penjualan sepeda motor bekas kepada pembeli.
2. Bagi pembeli harus benar-benar teliti dalam membeli barang bekas (sepeda motor bekas), harus tau betul kondisi sepeda motor bekas tersebut, apakah masih layak pakai atau ada yang sudah rusak. Di samping itu pembeli juga harus meminta kepada penjual bukti pembayaran berupa kuitansi di atas materai enam ribu agar mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 2014
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2003

_____, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1987

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, SH, MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2019

MASRI YANDI
NIM.11327105103

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rumbio Jaya.....	13
B. Geografis Kecamatan Rumbio Jaya.....	18
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	18
D. Sasaran, Hambatan, dan Pemecahan Masalah yang Terjadi....	19

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian.....	22
B. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	25
C. Unsur-Unsur Perjanjian.....	27
D. Pengertian Jual Beli.....	28
E. Asas-Asas Perjanjian.....	30



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Jual Beli Sepeda Motor Bekas yang Tidak Menggunakan Kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.....	33
B. Status Hukum Jual Beli Sepeda Motor Bekas yang Tidak Menggunakan Kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.....	40

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Jual beli haruslah dilakukan dengan sempurna dan dengan iktikad baik, baik dari penjual maupun dari pembeli. Demikian juga halnya dengan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Kabupaten Kampar, yang seharusnya menggunakan kuitansi tetapi tidak menggunakan kuitansi pembelian. Kuitansi pembelian tersebut penting sebagai bukti sudah terjadi jual beli, dan sebagai alat untuk balik nama, dan supaya harganya tidak turun ketika mau menjual lagi. Di samping itu juga agar tidak dituduh membeli barang curian, tidak bayar pajak, dan dapat juga berpengaruh kepada status hukum dari kendaraan tersebut. Kuitansi pembelian suatu barang adalah penting, sebagaimana halnya pembelian sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tersebut, apabila tidak menggunakan kuitansi maka barang yang dibeli tersebut bisa saja diragukan, apakah barang tersebut benar miliknya atau bisa saja milik orang lain.

Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dan bagaimana status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, antara lain adalah pembeli tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran, ketika ada pihak-pihak yang menanyakan hal tersebut. Di samping itu pembeli tidak menunjukkan kuitansi pembelian pada saat mau balik nama kepemilikan kendaraan tersebut, dan kuitansi pembelian tersebut juga berguna untuk tanda bukti pembayaran yang sah karena menggunakan materai enam ribu.

Sedangkan status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, adalah sah menurut hukum karena dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tentang barang dan harga yang ditawarkan maka sudah terjadi jual beli. Namun karena tidak menggunakan kuitansi secara administrasi kurang lengkap, karena pembayaran sejumlah uang tersebut harus ada buktinya berupa kuitansi pembayaran yang dibuat di bawah materai enam ribu.

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENJUAL

1. Apakah Bapak ada menjual sepeda motor bekas?
2. Apakah dalam jual beli sepeda motor bekas tersebut ada menggunakan kuitansi?
3. Apakah pembeli ada meminta kuitansi dalam jual beli sepeda motor bekas tersebut?
4. Apakah penjual menyerahkan BPKB dan STNK kepada pembeli?
5. Apakah menurut pembeli kuitansi jual beli tidak diperlukan lagi?
6. Apakah sebelum jual beli sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PEMBELI

1. Apakah Bapak/Sdr/Ibuk ada membeli sepeda motor bekas?
2. Apakah jual beli sepeda motor bekas tersebut ada menggunakan kuitansi?
3. Apakah penjual menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut?
4. Apakah dengan penyerahan BPKB dan STNK sudah dianggap telah terjadi jual beli terhadap sepeda motor tersebut?
5. Apakah menurut pembeli kuitansi tidak diperlukan?
6. Apakah sebelum jual beli sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM JUAL BELI MOTOR SEPEDA MOTOR BEKAS YANG TIDAK MENGGUNAKAN KUITANSI DI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR”, yang ditulis oleh:

Nama : MASRI YANDI
 NIM : 11327105103
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, SH.MH

NIP.19661002 199403 1 002

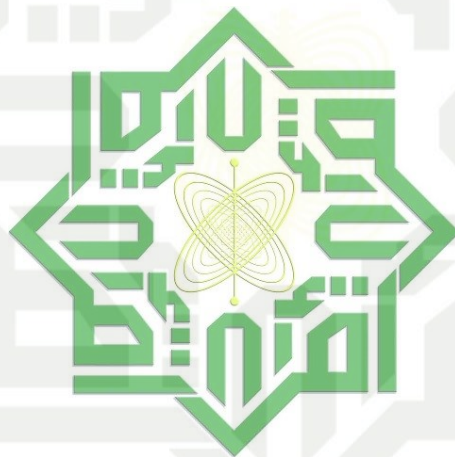
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKIBAT HUKUM JUAL BELI MOTOR BEKAS YANG TIDAK
MENGUNAKAN KUITANSI YANG BERHUBUNGAN
DENGAN BEA BALIK NAMA DI KECAMATAN
RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**



OLEH

MASRI YANDI
NIM.11327105103

ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul: "AKIBAT HUKUM JUALTM BELI MOTOR
PEPEDA MOTOR BEKAS YANG TIDAK MENGGUNAKAN KUITANSI DI
KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR", yang ditulis oleh:

Nama : MASRI YANDI
NIM : 11327105103
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SH.MH

NIP.19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3285/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
mengatakan bahwa :

Nama : MASRI YANDI
N I M : 11327105103
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 1 MARET 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 2 April 2019

Dekan,



DR. Dey H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Berkelompok Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: MASRI YANDI

: 11327105103

: ILMU HUKUM

: AKIBAT HUKUM JUAL BELI MOTOR BEKAS YANG TIDAK
MENGUNAKAN KUITANSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN BEA
BALIK NAMA DI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN
KAMPAR

Pembimbing : Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *AKIBAT HUKUM JUAL BELI SEPEDA MOTOR
BEKAS YANG TIDAK MENGGUNAKAN KUITANSI YANG BERHUBUNGAN
DENGAN BEA BALIK NAMA DI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN
KAMPAR*, yang ditulis oleh:

Nama : Masri Yandi
NIM : 11327105103
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2020

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Feri Pirmansyah, SH., M.H.

Penguji I
Boni Kurniawan, SH., MH.

Penguji II
Safrinaldi, SH., MA.

Kepala Subbagian Akademik
Kemahasiswaan Dan Alumni
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Masri Yandi Lahir di Kmpar pada Tanggal 07 Juni 1995, Masri Yandi lahir dari pasangan suami istri ayahanda Zuhir dan Ibunda Tiinsah. Masri Yandi merupakan anak Lima dari 5 bersaudara

Masri Yandi berasal dari Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masri pernah sekolah di SDN 034 Kampar dan selesai pada tahun 2007, kemudian

melanjutkan Mts Pondok Pesantren Islamic Centere Kab Kampar dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan sekolah MA Pondok Pesantren Islamic Centere Kab Kampar dan selesai pada tahun 2013. Selesai dari SMA, Masri Yandi melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum, Kosentrasi Hukum Bisnis, dan selesai pada tahun 2020 menyelesaikan Strata satu (S1) dan berhak menyangg gelar Sarjana Sosial (S.H).